



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. HERY SULISTIO HERMAWAN
2. Jabatan : WAKIL KEPALA DINAS
3. NHK : 427998

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.621.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m²/130 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 777.050.000
2. Tanah Seluas 144 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 364.400.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m²/64 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XVMT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
3. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA PSE02R22MI M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 80.715.916

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.871.265.916

III. HUTANG Rp. 235.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.636.265.916



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.